

MAJALAH TRIWULAN

HABAR Sekolah



Disdik Instruksikan Sekolah Galakkan Program Adiwiyata

Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Daftar Isi

■ Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Disahkan 03

■ Banjarmasin Masih Kekurangan Guru 04

■ Disdik Dapat Tambahan Rp.3 M Dana Bos 05

■ Kadis Pendidikan: “Full Day School” Hanya Sekedar Floating 06

■ Program RASS Harus Terus Disosialisasikan 07

■ DAK Pendidikan Rp. 10 Miliar..... 08



■ Sekolah Reguler Wajib Menerima Anak Berkebutuhan Khusus 09

■ Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin



Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Disahkan

Perubahan wewenang terhadap penyelenggaraan pendidikan berimbas pada perubahan payung hukum. Terkait kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah ini DPRD Kota Banjarmasin, akan mengesahkan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Banjarmasin.

RAPAT paripurna DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda Pengesahan Raperda terhadap revisi atau perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 2 tahun 2014 itu akan dilangsungkan hari ini Selasa (18/7).

Selain pengesahan Raperda atas revisi Perda Nomor : 2 tahun 2014 yang diajukan pihak Pemko itu, DPRD juga akan mengesahkan Raperda Izin Menderikan Menara Telekomunikasi sebagai revisi terhadap Perda Nomor : 23 tahun 2011.

Menurut Sri Nurnangsih, SE MM selaku Ketua Revisi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan, payung hukum ini dibutuhkan menyusul terbitnya



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan mengelola pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke pemerintah provinsi

Dikatakan, dalam Raperda ini juga memaut sejumlah urusan penyelenggaraan pendidikan, dari SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko Banjarmasin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam Raperda yang akan disahkan

ini akan memberikan perhatian kepada para guru honorer yang selama ini nasibnya masih jauh dari kesejahteraan.

Sebelumnya hal senada juga dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto. Ia menjelaskan, pemerintah kota mengajukan revisi Perda Nomor : 2 tahun 2014 diantaranya ingin memberi perhatian kepada para guru honorer.

"Sebab tenaga honorer yang mengabdikan diri dari tingkat TK, SD hingga SMP di daerah kita ini jumlahnya mencapai 2.000 orang lebih," ujarnya.

Banjarmasin Masih Kekurangan Ribuan Guru



Persoalan upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin rupanya masih menghadapi berbagai kendala yang kini belum mampu terpecahkan dengan baik .

BETAPA tidak, dari adanya sekolah yang mengalami kerusakan dan kekurangan ruang kelas, terakhir adalah soal belum teratasinya kekurangan tenaga pendidik (guru), khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi mengemukakan, di Kota Banjarmasin saat ini setidaknya masih memerlukan guru sekitar 1.100 orang.

“Kekurangan tenaga guru ini karena sekolah di kota ini kita cukup banyak dan belum sebanding dengan jumlah tenaga pendidik yang tersedia,” ujarnya kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Terkait permasalahan ini Nuryadi mengakui, salah satunya disebabkan karena tidak adanya proses penerimaan tenaga pengajar atau moratorium penerimaan aparatur sipil negara (ASN) yang masih berjalan.

“Sehingga guna mengatasi masalah tersebut semoga saja kita berharap pemerintah kembali membuka kesempatan penerimaan calon ASN, termasuk untuk penerimaan tenaga guru,” ujar Nuryadi.

Lebih jauh ia menjelaskan, untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sampai sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penerimaan tenaga guru honoror.

Meski pada sisi lain ia mengakui, terkait gaji yang diterima para guru honoror sangat kecil dan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). “Makanya menyikapi minimnya gaji guru honor tersebut pada tahun 2018 Dinas Pendidikan sudah mengusulkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebagian dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru honor,” ujarnya.

Disisi lain tambahnya, tahun ini Pemko Banjarmasin telah mengajukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan yang kini masih digodok melalui pansus dewan .

Dalam revisi Perda ini ujarnya, selain diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru honor, juga mencantumkan sekolah diwajibkan menerima siswa inklusi sebesar 1 hingga 2 persen.

“ Untuk guru bidang khusus ini, juga akan diatur dalam Raperda tersebut, dalam menangani siswa inklusi agar mereka mendapatkan pendidikan yang sama,” demikian kata Nuryadi.



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

Disdik Dapat Tambahan Rp 3 Miliar Dana BOS



■ Diprogramkan Pengadaan Komputer dan Rehab Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin dalam APBD Perubahan (ABPD-P) tahun anggaran 2018 ini mendapatkan tambahan Rp 3 miliar untuk bantuan dana operasional sekolah (BOS). Tambahan alokasi anggaran itu rencana diprogramkan untuk kegiatan rehab gedung sekolah yang rusak dan pengadaan komputer.

“Dalam APBD Perubahan tahun 2018 ini Disdik mendapatkan tambahan dana BOS sekitar Rp 3 miliar dan sesuai rencana digunakan untuk membantu proses rehab gedung sekolah yang mengalami kerusakan dan pengadaan computer,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto kepada sejumlah wartawan, Rabu (26/9) kemarin.

Sebelumnya ia mengatakan, pemanfaatan tersebut lantaran

untuk membangun gedung sekolah baru tidak memungkinkan karena waktu realisasinya juga hanya 3 bulan.

Diakuinya, saat ini sejumlah sekolah di kota banyak yang menutup perbaikan karena dalam kondisi rusak mulai ringan, sedang hingga berat, namun yang akan diperbaiki hanya gedung dengan kategori kerusakan mendesak.

“Seperti pembuatan halaman SDN Basirih 9, rehab gedung SDN Melayu 3, itu jadi prioritas kami. Untuk mengakomodir hasil reses dewan juga,” ujarnya

Dikatakannya, dana BOS tambahan yang di alokasikan pada APBD Perubahan sebesar Rp 3 Miliar, jumlah tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak. Namun pada tahun ini, pihaknya juga mengalokasikan sekitar Rp2 Miliar penyediaan peralatan komputer untuk menunjang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNKBK).

“Jadi hanya sekitar Rp1 Miliar untuk rehab gedung dan Rp2 Miliarnya untuk pengadaan komputer itu,” jelasnya.

Totok Daryanto mengatakan, pihaknya tetap optimis dengan batas waktu pelaksanaan yang hanya sekitar tiga bulan, semua perencanaan proyek perbaikan sekolah dan pengadaan komputer itu bisa terlaksana.



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

Kadis Pendidikan : 'Full Day School' hanya Sekedar Floating

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengakui, jika masih ada sekolah di kota ini yang masih menerapkan kebijakan sekolah selama lima atau 'Full Day School' (FDS).

Meski demikian ia mengatakan, menyusul keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 87 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, sebagai pengganti atas terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 tahun 2017 'full day school' dengan waktu belajar di sekolah selama delapan jam sehari itu sesuai Perpres tidak wajib dilaksanakan oleh sekolah.

"Terhadap adanya sekolah yang masih menerapkan atau melaksanakan 'full day school' itu karena ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai floating atau pilot project. Di Indonesia hampir semua daerah ada sejumlah sekolah yang masih menerapkan full day school, termasuk di Kota Banjarmasin," ujarnya.

Hal itu dikemukakan menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan adanya sekolah yang masih menerapkan full day school. Padahal menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, H Abul Muis menegaskan, semua sekolah yang ada di kota Banjarmasin mematuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 87 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter.

Usai rapat kerja dengan komisi IV DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda membahas RAPBD tahun 2018. Senin (20/11) Totok Agus



Daryanto mengemukakan, terkait floating sekolah yang ditunjuk melaksanakan full day school diatur secara terdiri melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Seperti diantaranya SMP Negeri VI difloating melaksanakan full day school, sedangkan untuk SMA/SMK saya kurang tahu karena kewenangannya sekarang berada di Pemprov Kalsel," tandas Totok Agus Daryanto.

Dikemukakan sepanjang sepengetahuannya, terhadap sekolah difloating melaksanakan full day school harus memenuhi kriteria dan sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Jadi bukan kita yang menentukan, tapi oleh ditunjuk dan diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian kami Dinas Pendidikan hanya bertugas melakukan evaluasi dan selanjutnya menyampaikan laporannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tambahnya.

Lebih jauh ia sekali menjelaskan, sesuai petunjuk dan arahan Presiden Joko Widodo tidak ada keharusan sekolah menerapkan

lima hari sekolah, sehingga jika ada sekolah yang tetap melaksanakan kebijakan enam hari sekolah tetap bisa dilanjutkan.

Sebelumnya menyusul kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan full day school akhirnya berbuntut polimek hingga memicu pro dan kontra, khususnya di kalangan penyelenggara pendidikan.

Pasalnya karena sejak diberlakukannya full day school dirasakan sangat berdampak terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tertentu, seperti diantaranya pada sekolah Madrasah Diniyah (MD) yang menyelenggarakan pendidikan ilmu agama maupun terhadap lembaga penyelenggaran yang memberikan pendidikan baca tulis Al-qur'an pada sore hari.

Menyikapi permasalahan dan adanya polimek terhadap penyelenggaran pendidikan ini, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Perpres Nomor : 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau disingkat PPK.

■ Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Program RASS Harus Lebih Disosialisasikan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, H Abdul Muis meminta agar Pemko Banjarmasin melalui SOPD terkait untuk mensosialisasikan Program Rute Aman dan Selamat ke dari Sekolah (RASS).

Abdul Muis menjelaskan, RASS merupakan program baru yang secara konseptual belum banyak dikenal oleh masyarakat. Karena itu, kesuksesan program RASS amat tergantung pada keberhasilan sosialisasi promosinya.

"Program ini perlu dipromosikan dan disosialisasikan kepada individu, masyarakat, sekolah, serta seluruh institusi pemerintahan di daerah yang terkait dengan tumbuh kembang dan perlindungan anak. Hal ini perlu diingatkan karena program RASS sangat kurang disosialisasikan," ujarnya.

Dijelaskan, tujuan dari program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) adalah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Program ini diwujudkan

dalam bentuk penerapan fasilitas perlengkapan jalan, seperti diantaranya pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), halte dan trotoar.

Selain itu melalui program ini menurut Abdul Muis, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak, mengurangi konsumsi bahan bakar, menjaga kesehatan dan secara tidak langsung untuk mengantisipasi kemacetan.

Intinya program RASS kata Abdul Muis, adalah program untuk mendorong murid dan orang tua murid untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan yang selamat, aman, nyaman dan menyenangkan untuk berangkat dan pulang sekolah, daripada menggunakan sepeda motor yang rawan kecelakaan.

■ Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Menurutnya, program RASS dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada anak-anak sekolah. Saat ini kata Abdul Muis mengemukakan, anak terpaksa berjalan di bagian jalan karena tidak tersedianya trotoar, atau berhadapan dengan jalan raya yang membuat mereka harus berhadapan dengan lalu lintas kendaraan yang bisa membahayakan keselamatan anak-anak baik saat berangkat maupun pulang sekolah.

Padahal, sesuai amanat Undang-Undang No 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi keselamatan Jalan, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebijakan demi keselamatan bagi warganya.

Selain itu kata wakil ketua komisi diantaranya membidangi masalah

pendidikan dan kesehatan dari F-PAN ini mengemukakan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai revisi Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 juga menyatakan secara tegas bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

"Ketentuan lain sesuai amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi keselamatan Jalan, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebijakan demi keselamatan bagi warganya," demikian kata Abdul Muis.





DAK Pendidikan Rp 10 Miliar

Pemko Banjarmasin tahun 2019 akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp 29 miliar. Bantuan yang bersumber dari APBN ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan perbaikan pendidikan dasar (dikdas) yaitu SD dan SMP.

"Penerimaan DAK tahun 2018 ini menurun dibanding tahun 2017 lalu, dimana kita menerima DAK untuk pendidikan sebesar Rp 11 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto usai rapat kerja dengan komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.

Menurutnya, sesuai prosedurs penerimaan Dana Alokasi Khusus tersebut penggunaannya akan dikurcurkan secara langsung ke pihak sekolah melalui sistem swakelola. Namun demikian lanjutnya, untuk administrasinya

atau pelaporannya tetap menjadi tanggung jawab di dinas pendidikan.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan berlaku penggunaan DAK tersebut, nantinya hanya untuk perbaikan fisik sekolah berupa rehab berat dan ringan, bukan digunakan untuk pembangunan penambahan ruang kelas baru.

"Masalahnya karena masih cukup banyak ruang sekolah di Banjarmasin khususnya SD yang memang memerlukan

perbaikan," ujarnya, seraya mengakui.

Lebih jauh dikemukakan selain DAK, dalam tahun 2018 ini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 60 miliar atau sama seperti diterima tahun 2017 lalu.

Menyinggung penggunaan dana BOS, Totok Agus Daryanto menjelaskan, jika tidak ada perubahan, penggunaan dana BOS mengacu pada Permendikbud Nomor : 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

"Intinya penggunaan dana BOS diperuntukan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah dan tidak diperkenankan untuk membiayai pembangunan fisik sekolah. Bantuan dana BOS ini biasanya dikurcurkan setiap per



kata
Totok
Agus Daryanto.

Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

Sekolah Reguler Wajib Menerima Anak Berkebutuhan Khusus



Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mulai tahun 2018 ini mewajibkan seluruh sekolah reguler, baik SDN maupun SMP untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus. (ABK).

KABID Pendidikan Dasar (dikdas) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi di Banjarmasin, kepada {KP} belum lama ini mengemukakan, semua SDN maupun SMP di kota ini wajib memberikan ruang bagi pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut antara 1-10 persen total peserta siswa baru.

Menurutnya, kebijakan itu menyusul sebagai tindak lanjut instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengintruksikan agar Anak Berkebutuhan Khusus dapat



diterima di seluruh sekolah reguler, baik sekolah negeri maupun swasta.

Ia juga menjelaskan, kebijakan membuat semua SD maupun SMP untuk menerima ABK kini tengah dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perubahan atau revisi terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Banjarmasin.

"Meski terkait ketentuan sekolah untuk menerima siswa ABK ini memerlukan pembahasan secara matang, terutama menyangkut soal penyediaan tenaga guru," ujar Nuryadi.

Diakuinya, sejauh ini sudah sebagian khusus SD di kota Banjarmasin sudah menerima siswa ABK. Namun demikian, untuk meningkatkan perannya perlu semua SD yang jumlahnya sebanyak 207 di 52 kelurahan di kota ini untuk lebih lebih dipertegas.

Masalahnya dengan kebijakan dan telah termuat dalam Perda itu menurut Nuryadi, diharapkan tidak

ada lagi sekolah yang menolak siswa atau Anak Berkebutuhan Khusus dengan alasan apapun.

Lebih jauh Nuryadi menegaskan, paradigma semua pihak termasuk pemerintah dan sekolah reguler baik negeri maupun swasta yang selama ini memisahkan pendidikan terhadap ABK haruslah berubah.

Ia juga menegaskan, tidak perlu didirikan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus sebab hal tersebut selain bisa bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM), tapi juga mengkotak-kotakan anak.

Menyinggu keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB), Nuryadi menilai, SLB bukan untuk mendiskreditkan anak. Tapi salah satunya bertujuan untuk pengembangan pusat sumber daya manusia (SDM guru).

"Kedepan SLB bisa menjadi salah satu sumber yang membantu sekolah reguler," demikian kata Nuryadi.

Pemko Banjarmasin Wajib Programkan Penyiapan Generasi Cerdas

Banjarmasin, - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sofyan mengemukakan, Pemko Banjarmasin wajib memprogramkan sejumlah kebijakan strategis dalam kerangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan di kota ini.

Harapan itu disampaikan guna menyosong terciptanya generasi cerdas yang ditargetkan pemerintah pusat mampu tercapai tahun 2045.

“Pemko Banjarmasin wajib terus berupaya melakukan berbagai terobosan dalam menjembatani dan ikut mendukung apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut, yaitu terwujudnya generasi cerdas,” tandasnya.

Kendati sebelumnya Deddy Sofyan mengakui, untuk mengimplemenasi program tersebut bukan sesuatu yang mudah, bahkan sebaliknya banyak sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Secara umum kata Deddy Sofyan yang menjadi alasan adalah soal keterbatasan anggaran.

Sementara ungkapnya, hingga kini masih banyak sarana dan prasarana pendidikan di Kota Banjarmasin dirasakan belum memadai. “Belum lagi Kota Banjarmasin yang hingga kini masih menghadapi persoalan kekurangan hampir ribuan tenaga guru,” ujarnya.

Dikemukakan, soal penyediaan anggaran pendidikan selama ini belum berjalan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dibuktikan dengan belum meratanya 20 persen dari APBD dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana dimanat dalam UUD 1945.

Masalah lain lanjut wakil ketua komisi dari FPKB ini adalah, jika program itu belum ditunjang oleh

kemampuan birokrat di daerah dalam mengambil kebijakan dana terobosan terhadap upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

“Hingga pada soal masih adanya pola pikir dan kultur masyarakat yang beranggapan tidak usah menempuh pendidikan tinggi, jika akhirnya sangat sulit mencari pekerjaan yang layak,” tandas Deddy Sofyan.

Dikemukakannya, dengan adanya program tersebut sekolah dilarang mengenakan pungutan kepada setiap calon siswa ketika memasuki jenjang pendidikan hingga SMA yang selama ini banyak dikeluhkan.

Karenanya menurut wakil ketua komisi yang salah satunya membidangi masalah pendidikan tersebut mengatakan program pemerintah yang kini tengah berusaha merealisasikan

Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun merupakan khabar gembira yang harus disambut positif.

Ditegaskan, relatif mahal biaya pendidikan yang dirasakan selama ini tentunya sangatlah memberatkan terutama bagi masyarakat miskin ketika ingin menyekolahkan anaknya ketingkat menengah atas.

Sehingga menyadari hal demikian lanjutnya, meski pemerintah sudah melaksanakan programkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan kini sudah direalisasikan wajib belajar 12 tahun, namun tidak sedikit para orang tua yang berpenghasilan rendah akhirnya tidak mampu melanjutkan pendidikan anak mereka ke SMA atau sederajat, apalagi sampai kejenjang perguruan tinggi.



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin



Penanaman Pohon Bersama Komunitas Hijau Banjarmasin

Bertempat di SMP Negeri 15 Banjarmasin, Dinas Pendidikan bersama Komunitas Hijau Banjarmasin melakukan penanaman pohon di lingkungan Sekolah. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto bersama jajaran selepas "goes" sepeda sehat dan senam bersama.

Penanaman pohon ini dilakukan untuk , penghijauan I kota Banjarmasin, serta untuk meningkatkan kualitas udara di kota Banjarmasin.

penanaman pohon ini menapat antusias yang tinggi dari pihak sekolah dan seluruh siswa.

Kepala dinas pendidikan berharap, kegiatan menanam pohon ini dapat menjadi contoh yang wajib ditiru oleh semua pihak , mengingat pohon adalah sarana untuk menambah oksigen yang sangat penting untuk kehidupan" ujarnya.



Launching Aplikasi E - Surek

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melalui Bidang Pendidikan SD me-Lauching aplikasi E-Surek (Surat Rekomendasi Elektronik) bertempat di Ruang IT Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Aplikasi ini



ADALAH inovasi Dinas Pendidikan yang mempermudah masyarakat mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Kependidikan Siswa, baik antar Sekolah di dalam Kota Banjarmasin maupun ke Luar Kota Banjarmasin. Sistem ini terintegrasi dengan Data Pokok

Pendidikan di Kota Banjarmasin yang bersumber dari Data Referensi Kemendikbud (Dapodik) <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/> dan (bakul data disdik) <http://bakul.disdik.banjarmasinkota.go.id>.

Aplikasi ini juga sebagai wujud Dinas Pendidikan siap mendukung Banjarmasin Smart City sebagai salah satu Visi & Misi Walikota Banjarmasin.

Prestasi Pelajar Kota Banjarmasin pada Lomba O2SN Tahun 2018

Gelaran O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) Tahun 2018 yang sedang berlangsung di Yogyakarta berbuah manis bagi kontingen Kalimantan Selatan khususnya siswa siswi yang berasal dari Sekolah di Kota Banjarmasin.



BUAH dari kerja keras tersebut berhasil didapat oleh ananda **Akmal** siswa SDN Banua Anyar 10 Banjarmasin dan **Nurlaili** siswi SMPN 15 Banjarmasin yang menyabet Medali Emas untuk Cabang Pencak Silat.

Selain Akmal dan Nurlaili, Medali Perunggu juga diraih oleh **Lukmanul Hakim** siswa SMPN 7 untuk cabang Bulutangkis.

Kepala Dinas pendidikan kota Banjarmasin berharap melalui keberhasilan ini hendaknya tidak menjadikan siswa yang telah berhasil meraih juara menjadi terlena, namun hendaknya terus berusaha meningkatkan prestasi sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi.

“bagi siswa yang sudah berhasil jangan hanya berhenti sampai disini, namun berusaha untuk lebih giat berlatih, sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi” tuturnya.

■ Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Disdik Instruksikan Sekolah Galakkan Program Adiwiyata

Satu Siswa Satu Bunga



Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin menginstruksikan agar seluruh sekolah di kota ini untuk menggalakan Program Adiwiyata. Terkait pelaksanaan program ini diharapkan partisipasi siswa dengan menyerahkan bunga ke sekolah masing-masing untuk ditanam.

“Tidak perlu banyak-banyak minimal satu siswa satu bunga,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, usai rapat kerja dengan komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, kepada belum lama ini.

Sebelumnya Totok Agus Daryanto menjelaskan, instruksi itu dikeluarkan dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Adiwiyata dalam menanamkan nilai-nilai kecintaan lingkungan kepada siswa sejak dini.

Menurutnya, program satu siswa satu bunga tersebut, tidak dinilai dari segi materi karena bunga yang diserahkan kepada sekolah tidak ditentukan jenisnya, apalagi sampai yang harganya relatif mahal.

“Pokoknya bisa saja bunga yang sudah ditanam di halaman di rumah, jadi tidak harus beli,” katanya.



Ditandaskan Totok Agus Daryanto, program itu akan terus di jalankan pada setiap awal tahun ajaran. Hingga nanti, target penghijauan di seluruh sekolah di Kota Banjarmasin dapat terpenuhi.

Totok menambahkan, jika setiap anak konsisten untuk menghibahkan satu bunga di sekolah. Maka dipastikan seluruh sekolah yang ada di kota itu, akan terlihat asri dan hijau.

“Kalau jumlah muridnya 700 orang, berarti bisa kita hitung berapa bunga yang akan di tanam. Jenisnya terserah saja, sehingga di sekolah itu banyak bermacam-macam jenis bunga,” bebernya.

Terkait pelaksanaan program ini Totok berharap mendapat dukungan penuh semua pihak, termasuk dari para orang tua. Sehingga kedepan, dapat mendukung program lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

Menyinggung perawatan ia menyerukan, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tapi juga para siswa. “Misalnya dilakukan setiap perkelas,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran siswa di sekolah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Lomba Olahraga Tradisional Memeriahkan HUT Kota Banjarmasin

BANJARMASIN, -- Bertempat di halaman Balaikota Pemetintah Kota Banjarmasin, Jumat 14 September 2018 setelah Senam Bersama, berlangsung Lomba Olahraga Tradisional antar SKPD dalam rangkaian menyambut HUT Kota Banjarmasin yang Ke-492. Untuk cabang lomba Tradisional yang di lombakan antara lain Tarik Tambang, Balogo, Enggrang, dan Asinan. Adapun untuk Dinas Pendidikan mengikuti lomba Tradisional Enggrang.

Dilaksanakanya lomba olah raga tradisional ini, bertujuan untuk melestarikan budaya banjar yang memang banyak memiliki tradisi, seperti aneka permainan yang saat ini memang suah sangat jarang di memainkan oleh generasi muda.

Melalui perean serta Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, walikota berharap tradisi ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk lebih memperkenalkan permainan



tersebut kepada generasi muda di kota Banjarmasin.

“Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, cukup banyak permainan tradisional asli daerah yang saat ini mulai kurang diminati oleh generasi muda, karenanya melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat memperkenalkan olah raga tradisional kekalangan

generasi muda, sehingga nantinya tidak akan unah begitu saja “ tutur walikota.



■ Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

LOMBA UKS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN 2018

Banjarmasin. Setelah melalui berbagai penilaian, sejumlah sekolah dari tingkat SPM, SD dan Taman Kanak-kanak berhasil menjadi pemenang dalam lomba Usaha Kegiatan Sekolah (UKS) 2018.

Lomba ini digelar dengan tujuan untuk membudayakan kebiasaan pihak sekolah agar mampu menciptakan usaha yang dapat mendukung proses belajar mengajar sehingga mampu lebih mandiri.

Selain itu, dengan kegiatan lomba UKS ini dapat memacu jiwa usaha kepada seluruh peserta didik.

Penyerahan hadiah lomba UKS ini dilaksanakan di halaman



kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu

oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto kepada seluruh pemenang lomba. Adapun pemenang lomba dari jenjang SMP, SD dan Taman Kanak-kanak adalah sebagai berikut,

Jenjang SMP:

- Juara 1 SMP Negeri 14
- Juara 2 SMP Negeri 18
- Juara 3 SMP Negeri 6
- Juara harapan I Mts Al- huda

Jenjang SD:

- Juara 1 SD Negeri Sungai Miai 5
- Juara 2 SD Negeri Antasan Bsr 7
- Juara 3 SDN Kebun Bunga 6
- Harapan 1 SDN Telaga Biru 1

Jenjang TK:

- Juara 1 TK Widya Dharma Juara
- Juara 2 TK Adhyaksa XIV
- Juara 3 TK Alam dan Sains Citra Islami
- Juara Harapan 1 TK Kemala Bhayangkari I



■ Media Informasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

GALERY FOTO PEMENANG LOMBA UKS



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

GALERY FOTO KEGIATAN SENAM DISDIK



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

GALERY FOTO BIMBINGAN ROHANI DISDIK



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

IKLAN LAYAN MASYARAKAT

CIPTAKAN GENERASI **EMAS** ANTI NARKOBA

JADILAH INSAN YANG BERGUNNA
TIDAK HANYA BAGI **KELUARGA**
TAPI JUGA **BANGSA** DAN **NEGARA!!!**



IKLAN LAYANAN INI DISAMPAIKAN OLEH:
**DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN**



■ Media Informasi Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

STOP

**Buang
sampah**

SEMBARANGAN

